BUNGAAPI #4

NEWSLETTER

Jangan pernah ragu untuk membajak dan menyebarkan selebaran ini

Intro Ngalor-Ngidul

Halo jumpa lagi dengan kami, selebaran yang rilis di bulan yang bukan lebaran. Tak terasa lho kami sudah memasuki edisi #4 aja nih. Ini benar-benar diluar ekspektasi kami. Awalnya selebaran dibuat sebagai pendamping saat flowerviolence show, eh malah kami keterusan membuat newsletter ini. Semoga saja kami tetap istiqomah ya membuat tulisan dan menyebarkan newsletter ini.

Pada edisi #4 ini, kami nggak banyak masukin tulisan seperti edisi #3 sebelumnya. Padahal rencana awalnya di edisi #3 dan edisi-edisi selanjutnya adalah kami bermaksud menerjemahkan per-bab dari Day of War Night of Love karya Crimethinc. Tapi karena kami terlalu malas untuk menerjemahkan, ya akhirnya di edisi ini kami urungkan rencana tersebut. Sebagai gantinya kami memasukkan sebuah artikel yang memuat mengenai maraknya kriminalisasi atau pembungkaman oleh negara kepada rakyatnya. Kebetulan artikel ini diinspirasi oleh salah satu lagu berjudul Bengis yang dimiliki oleh band asal Makasar bernama Hook. Di artikel tersebut kami menyoroti carut-marutnya 2 kasus pembungkaman yang terjadi di ujung timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi. 2 kasus pembungkaman itu adalah kasus kriminalisasi dan penahanan yang menimpa Budi Pego dan 3 petani Pakel.

Akhir kata, lagi-lagi kami ucapkan terima kasih kepada Zen masih berkenan memberikan artwork kolasenya untuk jadi pelengkap newsletter ini biar nggak sepi-sepi banget. Kami rasa cukup ngalor-ngidulnya. Newsletter ini bisa kalian dapatkan saat show Flowerviolence . Kalian juga bisa mendownload newsletter ini di link IG kami xflowerviolencex. Tak lupa juga jika kawan-kawan memiliki saran dan masukan atau mungkin kawan-kawan punya unek-unek dan caci maki, sila kawan-kawan DM kami di IG kami atau email ke kami di alamat email xflowerviolencex666@gmail.com. Selamat membaca ya kawan. Cheers.

MENAKAR KRIMINALISASI NEGARA TERHADAP RAKYATNYA

Bengis terkam
Hajar tiada ampun
Sekap ancam
Peras sampai habis
Jebak muslihat
Tuding hingga gugat
Target operasi
Tembak sampai mati
(Hook – Bengis)



.

Baru-baru ini Hook, sebuah band punk dari Kota Makasar merilis demo albumnya yang berisi 3 lagu ngebut dan raw. Dari 3 lagu tersebut terdapat 1 lagu berjudul bengis. Lagu berbahasa Indonesia berlirik kritis, singkat, tegas dan bernas. Apalagi ditambah dengan vokal yang berapi-api sehingga semakin meneguhkan kesan raw dan ganas. Tapi omong-omong tulisan ini bukan untuk mereview musikalitas dari Hook ya. Biarlah para reviewer yang lebih pantas mereview musikalitas berikut pernak-perniknya dari band asal Kota Makasar tersebut.

Kami lebih tertarik menyoroti lirik lagu dari band asal Kota Makasar tersebut dan mengkaitkannya dengan realita di negeri ini. Seperti kita ketahui bersama negeri ini mengalami krisis demokrasi, dimana kriminalisasi, dan pemenjaraan masih menjadi langkah bagi penyelenggara negara ini untuk membungkam rakyatnya yang ingin menyuarakan aspirasinya. Dengan bengis, penyelenggara ini memberhangus dan menjadikan rakyatnya sebagai target operasi dalam mengamankan laju gerak dari kuasa modal. Persis seperti yang disampaikan oleh Hook dalam

lagunya berjudul Bengis. Lalu apa yang terjadi di negeri ini.

2 Kasus Pembungkaman di Ujung Timur Pulau Jawa

Beberapa tahun ini bahkan mungkin tahun-tahun kedepan mata kita terbelalak dengan banyaknya kasus pembungkaman dan kriminalisasi yang terjadi di negeri ini. 2 kasus diantaranya terjadi di ujung timur Pulau Jawa yaitu di Kabupaten Banyuwangi. 1 kasus terjadi pada Heri Budiawan atau dikenal dengan nama Budi Pego yang dikriminalisasi karena aktivitasnya menolak kehadiran tambang emas di Tumpang Pitu. Aktivitas penolakan tambang yang dilakukan oleh Budi Pego ini didasarkan pada upaya Budi Pego dalam menyelamatkan kampungnya dan Lingkungan sekitarnya dari ekspansi tambang emas yang berpotensi merusak bentang alam di Kawasan pegunungan Tumpang Pitu dan membawa bencana ekologi bagi Lingkungan sekitar. Kriminalisasi oleh negara terhadap Budi Pego ini berujung penangkapan dan pemenjaraan Budi Pego.

Kasus selanjutnya yang juga terjadi di ujung timur Pulau Jawa adalah terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Upaya kriminalisasi dilakukan negara untuk memberangus hak warga Pakel untuk mendapatkan tanah dan berkehidupan dengan layak. Mengutip apa yang disampaikan Walhi Jatim dalam papernya berjudul "Konflik Agraria di Pakel Adalah Bentuk Pengabaian HAM"[1] menyatakan bahwa "dari 2020 hingga 2023 total terdapat 14 warga yang dikriminalisasi, 11 diantaranya hanya sampai pada fase pemanggilan, sementara 3 lainnya kini tengah menghadapi sidang pidana atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Tidak hanya itu dalam rentang 3 tahun telah terjadi sekitar 3 kejadian dalam bentuk intimidasi dan kekerasan, baik oleh perkebunan maupun kepolisian Banyuwangi". Seperti yang disampaikan diatas, upaya kriminalisasi tersebut berujung penahanan 3 petani hingga detik ini. 2 kasus diatas hanya terjadi 2 wilayah timur pulau Jawa, belum kasus-kasus kriminalisasi lain yang terjadi di Bara-Baraya Sulawesi, Tamansari Bandung, Kalimantan, Sumatera hingga Papua Barat.

Perselingkuhan Mesra Negara dan Kapitalisme

2 kasus diatas merupakan secuil konflik yang terjadi di ujung timur pulau Jawa sebagai akibat dari adanya hubungan mesra Negara dengan kuasa modal untuk melawan warganya. Negara dengan sesuka hatinya membuat regulasi untuk memuluskan kepentingan ekonomi para elite. Alhasil konflik terjadi dimana-mana antara negara melawan rakyatnya. Konflik ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan dialami pada berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, infrastruktrur, pertanian maupun kehutanan. Persoalan-persoalan seperti tumpang tindih hak warga atas tanah dengan perusahaan swasta ataupun milik negara, perpanjangan izin perusahaan yang menyerobot tanah milik warga atau mungkin pembiaran negara terhadap perusahaan yang menyalahi prosedur ataupun mencemari Lingkungan kerap terjadi sebagai akibat mesranya hubungan negara dan kapitalisme.

Mesranya hubungan kekuasaan dengan kapitalisme ini tak lain dan tak bukan untuk menjaga sumber daya ekonomi tetap berada di tangan segelintir orang, sehingga akumulasi modal tetap terjaga dan langgeng selamanya. Demi melanggengkan akumulasi modal regulasi-regulasi pun dicipta oleh kelas penguasa dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Omnibus Law salah satu contohnya. Regulasi yang digaungkan untuk kemajuan atau pembangunan itu jelas-jelas dicipta untuk memporak-porandakan kehidupan rakyat dan memuluskan kapitalisme. Lalu apa yang terjadi bagi mereka yang menolak atau menghambat laju akumulasi modal, label komunis, melawan pemerintah dan mengganggu keamanan disiapkan untuk membungkam mereka.

Upaya Kriminalisasi Menggunakan Cara-Cara Lama Ala Orde Baru

Dari 2 kasus di ujung timur Pulau Jawa tersebut kita ketahui cara-cara lama negara dalam membungkam mereka yang dipandang mengganggu stabilitas laju kuasa modal. Contoh pada kasus Budi Pego, Negara dengan perangkatnya menggunakan tuduhan bahwa Budi Pego menyebarkan ajaran komunisme. Tuduhan itu didasarkan pada kabar adanya bendera berlogo palu arit yang identik dengan komunisme saat aksi penolakan tambang yang dilakukan oleh Budi Pego. Tuduhan tersebut sangat lucu, bagaimana mungkin seorang Budi Pego yang lulusan Madrasah Tsanawiyah dan pernah kerja di Arab

Saudi itu menyebarkan Komunisme, bahkan untuk membaca teori-teori Komunisme saja Budi Pego tidak pernah. Hal ini diperparah dengan realita bahwa pengadilan tidak pernah mampu menunjukkan keberadaan dari bendera berlogo palu arit tersebut.

Sedang 3 petani Pakel yang ditangkap, yaitu Mulyadi (Kepala Desa Pakel), Suwarno (Kepala Dusun Durenan), dan Untung (Kepala Dusun Taman Glugoh) dikenakan masalah penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran, dan yang dimaksud adalah penyebaran mengenai "Akta 29' kepada warga Desa Pakel. Hingga kini ketiganya masih ditahan dan belum mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Akar dari permasalahan 3 petani Pakel tersebut adalah konflik agraria yang tidak pernah diselesaikan oleh Negara[2]. Negara abai terhadap hak-hak rakyatnya untuk mendapatkan tanah dan penghidupan yang layak namun peduli terhadap upaya pencaplokan tanah yang dilakukan oleh korporasi. Ketika negara abai terhadap rakyatnya dan memihak ke korporasi maka cara yang dilakukan adalah kriminalisasi dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Dua gambaran diatas menunjukkan ke kita bahwa negara ini masih saja memakai cara-cara lama ala orde baru dengan menuduh mereka yang melawan dengan dalih komunisme, menyebarkan berita bohong dan lain-lain.

Demokrasi Hanyalah Slogan

Mungkin bagi kebanyakan khalayak umum berpendapat bahwa era reformasi saat ini adalah era demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kebanyakan masyarakat berargumen bahwa dengan runtuhnya orde baru, banyaknya partai dan dilakukannya pemilihan umum, demokrasi telah mengalami peningkatan dan perbaikan. Padahal kenyataannya hal ini berbanding sebaliknya jika mengutip artikel dari Tempo.co[3] dikatakan bahwa "Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54".

Turunnya indeks demokrasi tersebut bukan tanpa sebab, salah satunya karena upaya-upaya pembungkaman negara dan perangkatnya terhadap rakyatnya yang menyampaikan aspirasinya atas nama stabilitas negara dan laju kuasa modal. Lambat laun demokrasi hanyalah sebuah slogan kosong belaka yang kerap diucapkan oleh mereka para elit politik saat pemilu 5 tahunan saja. Lambat laun pula watak otoritarianisme makin kentara menunjukkan wujud aslinya di negeri ini. Dan militer maupun polisi yang menjadi perangkat dari negara untuk memberangus mereka yang melawan atau mengkritisi kebijakan negara serta menghambat akumulasi nilai lebih.

Badai Dimulai Dengan Satu Tetes Hujan

Sebagai penutup kami tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa kami menginginkan masyarakat yang terus berkembang. masyarakat yang secara konstan mampu menghancurkan dan memperbarui sekeliling mereka serta diri mereka sendiri:dimana kemandirian merupakan kekuatan terbesarnya, dimana mereka takkan tunduk apapun; selalu ingin membuat sesuatu menjadi lebih baik dan merengkuh banyak hal dalam kehidupan . Kami percaya bahwa demokrasi akan menjadi taktik yang akan dipilih oleh masyarakat untuk memperbarui sekeliling dan melawan dominasi. Dan kami percaya pula bahwa letupan atau sulutan api kecil tetap perlu dilakukan untuk membuat sebuah perubahan sosial. Solidaritas kepada mereka yang tertindas tetap perlu dirawat agar api semangat perlawanan tetap terjaga. **Bebaskan Budi Pego dan 3 Petani Pakel. Tabik.**

---

1. Walhi Jatim, "Kertas Posisi Walhi Jatim – Konflik Agraria di Pakel Adalah Bentuk Pengabaian HAM", 12 Juli 2023.
2. Puputan Pakel "Atas Nama Tanah Pakel", Mei 2023.
3. Javier Faisal, Tempo.co, Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan, Februari 2023, https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan.



WHAT A WONDERFUL WORLD

I SEE TREES OF GREEN RED ROSES TOO I SEE THEM BLOOM FOR ME AND YOU AND I THINK TO MYSELF

I SEE TREES OF GREEN RED ROSES TOO I SEE THEM BLOOM FOR ME AND YOU AND I THINK TO MYSELF